

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan topik yang paling banyak di bicarakan diberbagai forum baik Nasional maupun Internasional sebab tolak ukur kemajuan dari suatu Negara adalah kemajuan ekonominya. Banyak perusahaan bergerak dalam dunia bisnis mulai dari pengusaha kecil, pertanian, industri, perumahan, keuangan dan usaha lainnya. Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun tidak pernah lepas dari masalah modal untuk membiayai usahanya baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan Giro, Tabungan dan Deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan dalam menyalurkan dananya hendaklah tetap berorientasi pada faktor-faktor pertumbuhan, maksud disini adalah diarahkan pada sektor-sektor yang produktif yang dapat membawa dampak ganda, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, penambahan lapangan usaha penduduk maupun penambahan devisa.

Selain itu perbankan juga mempunyai peranan yang sangat penting dan aktif dalam memperlancar transaksi perdagangan baik ditingkat nasional maupun internasional. Penerimaan utama dari Bank diharapkan dari penyaluran kredit, mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaan tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relative tinggi dari pada aktiva lainnya. Perkreditan bukanlah masalah yang asing baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena semuanya penuh dengan resiko bagi pihak lembaga kredit. Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus baik, dalam menjaga *image* (kesan) baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri.

Pengembangan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Mengingat kredit yang diberikan bank kepada usaha rakyat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara

Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta memberikan fasilitas pelayanan kredit, yakni BNI Griya, BNI Griya Multiguna, BNI Fleksi, BNI Instant, BNI Fleksi Pensiun, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit *Supply Chain*, KKLK, BNI Wirausaha (BWU), Kredit Usaha Rakyat, Kredit Beragun Deposito Berjangka, dan lain-lain. Selain itu Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta juga memiliki produk Tabungan, Deposito, Giro, ataupun fasilitas layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta adalah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro kecil menengah.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dan dijamin oleh perusahaan penjamin. Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit (debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah, Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta selaku kreditur harus benar-benar menganalisa debitur

baik secara *intern* maupun secara *ekstern* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dengan proses yang sangat mudah, untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta meminimalisir resiko kredit, didalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima bank seringkali tidak sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, petugas bank memberikan syarat-syarat yang dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik menulis Tugas Akhir ini dengan judul **"Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta."**

1.2 Penjelasan Judul

1. Pelaksanaan

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987:5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2. Kredit Usaha Rakat

Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif

dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

3. Pada

Menurut KBBI Pada yaitu Kata Penghubung

4. Bank Negara Indonesia

Menurut Wikipedia Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN, di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia (BNI), dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini dijabat oleh Achmad Baiquni.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah pada saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?
2. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?
3. Bagaimana penentuan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?
4. Bagaimana penentuan angsuran beserta perhitungan beban bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?
5. Apa saja agunan/jaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh debitur serta bagaimana penyerahan dan pengambilan agunan/jaminan tersebut pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?
6. Apa saja hambatan-hambatan pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?
7. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah pada saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.

3. Untuk mengetahui penentuan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.
4. Untuk mengetahui penentuan angsuran beserta perhitungan beban bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.
5. Untuk mengetahui agunan/jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh debitur serta untuk mengetahui bagaimana penyerahan dan pengambilan agunan/jaminan tersebut pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.
6. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.
7. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, Jenis data primer yaitu menggunakan data yang didapatkan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan di bagian BNI bagian Bisnis Usaha Kecil.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang di ambil melalui:

- a. Wawancara, yaitu dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak yang terlibat langsung dalam proses penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Wawancara langsung ini mengenai bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI.
- b. Studi Dokumen, yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang di sajikan perusahaan.

3. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan situasi, kondisi dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang ada.

